

**STRATEGI PENINGKATAN PERSENTASE KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH  
BESAR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Muhammad Irsyad

NPP 31.0024

*Asdaf Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh*

*Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email : muhammadirsyad17042001@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background:** This study investigates the strategies for enhancing the percentage of ownership of Electronic Identity Cards (e-KTP) within the Department of Population and Civil Registration in Aceh Besar Regency, Nanggroe Aceh Darussalam Province. **Purpose:** The primary objective of this research is to analyze the effectiveness of various strategies implemented by the Department of Population and Civil Registration in Aceh Besar Regency to increase the ownership percentage of e-KTP. **Method:** A qualitative research approach is adopted, involving interviews with key stakeholders, analysis of official documents, and observation of implementation processes. **Result:** The findings indicate that the Department of Population and Civil Registration in Aceh Besar Regency has employed several strategies, including extensive socialization campaigns, mobile services, integration of services, and technological innovations such as the E-Siap Online system. While these strategies have shown promising results, challenges such as low public awareness, technical constraints in biometric data collection, and infrastructural limitations in remote areas persist. **Conclusion:** The study concludes that the strategies implemented by the Department of Population and Civil Registration in Aceh Besar Regency have contributed positively to increasing the ownership percentage of e-KTP. However, to address existing challenges and further enhance effectiveness, continuous evaluation, adaptation, and collaboration with various stakeholders are recommended.

**Keywords:** Electronic Identity Card (e-KTP); Strategy; Population and Civil Registration Department; Aceh Besar Regency.

**ABSTRAK**

**Permasalahan:** Penelitian ini menginvestigasi strategi untuk meningkatkan persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. **Tujuan:** Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas berbagai strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan persentase kepemilikan KTP-el. **Metode:** Pendekatan penelitian kualitatif diadopsi, yang melibatkan wawancara dengan para pemangku kepentingan utama, analisis

dokumen resmi, dan observasi proses implementasi. **Hasil:** Temuan menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Besar telah menggunakan beberapa strategi, termasuk kampanye sosialisasi yang ekstensif, layanan keliling, integrasi layanan, dan inovasi teknologi seperti sistem E-Siap Online. Meskipun strategi-strategi ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, tantangan-tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kendala teknis dalam pengumpulan data biometrik, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil masih ada. **Kesimpulan:** Studi ini menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Besar telah berkontribusi positif dalam meningkatkan persentase kepemilikan KTP-el. Namun, untuk mengatasi tantangan yang ada dan lebih meningkatkan efektivitas, evaluasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan secara terus menerus.

**Kata kunci :** Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); Strategi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kabupaten Aceh Besar.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Administrasi kependudukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, merupakan serangkaian kegiatan penertiban dan penataan data serta dokumen kependudukan melalui pendaftaran dan pencatatan sipil. Administrasi ini dikelola untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik. Pentingnya administrasi kependudukan juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah layanan publik yang mencakup penerbitan dan pengelolaan dokumen yang diperlukan oleh masyarakat. Layanan ini memberikan manfaat dalam perumusan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan. Sejak masa penjajahan Belanda hingga awal 2011, administrasi kependudukan di Indonesia dilakukan secara manual, yang sering kali mengakibatkan data tidak akurat dan bersifat lokal tanpa integrasi nasional.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menginisiasi inovasi berupa integrasi KTP dengan sistem elektronik nasional melalui KTP Elektronik (KTP-El). KTP-El bertujuan mengurangi manipulasi data, redundansi, serta menghemat anggaran negara dengan keamanan yang ditingkatkan menggunakan pencatatan biometrik seperti iris mata dan sidik jari, serta sistem UID (*Unique Identification Data*) dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan satu NIK, setiap warga negara Indonesia memiliki identitas unik yang tidak dapat digandakan. Administrasi kependudukan memiliki dua fungsi utama: registrasi dan hukum. Fungsi registrasi meliputi pengesahan status seseorang secara pedata dan pembuatan mikrodata untuk kebijakan dan pembangunan. Fungsi hukum memberikan kepastian hukum kepada warga negara, menjamin keadilan tanpa diskriminasi.

Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Program ini terdiri dari peningkatan perilaku tertib administrasi, pemenuhan kepemilikan dokumen, peningkatan nilai guna dokumen untuk pelayanan publik, dan pencapaian target kinerja pemerintah daerah.



Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan, seperti KTP Elektronik, masih rendah. Di Kabupaten Aceh Besar, persentase kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2021 adalah 71,4% dan meningkat menjadi 79,84% pada tahun 2022. Upaya peningkatan kepemilikan KTP Elektronik dilakukan melalui program jemput bola dan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan persentase kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan teori strategi pemerintah Geoff Mulgan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan di Indonesia.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun berbagai regulasi dan inovasi telah diterapkan untuk memperbaiki administrasi kependudukan di Indonesia, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang belum sepenuhnya teratasi. Pertama, kesadaran dan kepemilikan dokumen kependudukan masih menjadi masalah, terutama di daerah seperti Kabupaten Aceh Besar, di mana tingkat kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2022 hanya mencapai 79,84%, meskipun telah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Kedua, efektivitas implementasi program seperti Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) belum dievaluasi secara mendalam, khususnya dalam konteks peningkatan kepemilikan KTP Elektronik di tingkat daerah. Ketiga, meskipun KTP Elektronik diharapkan mampu mengurangi manipulasi data dan meningkatkan efisiensi administrasi, penerapan teknologi ini belum sepenuhnya optimal di beberapa daerah, sehingga masih ada masalah data yang belum terselesaikan akibat sistem manual yang digunakan di masa lalu. Keempat, kurangnya penelitian yang meneliti strategi pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan praktis dan operasional dalam pelaksanaan administrasi kependudukan menunjukkan kebutuhan akan pendekatan strategis yang lebih efektif. Terakhir, keterbatasan data dan informasi sering kali mempengaruhi kualitas rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan administrasi kependudukan. Penelitian ini akan fokus pada kesenjangan-kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam tentang strategi peningkatan persentase kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Aceh Besar. Dengan menggunakan teori strategi pemerintah Geoff Mulgan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pendekatan yang lebih efektif dan dapat diterapkan secara praktis oleh pemerintah daerah, serta menyediakan data yang lebih komprehensif dan akurat untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang berperan sebagai referensi untuk menambah wawasan dan sudut pandang baru terkait topik yang akan diteliti. Pertama, penelitian oleh Daraba et al. (2023) mengenai pembangunan pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital di Indonesia menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Kedua, penelitian oleh Rohmah & Kholifah (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan penerapan IPTEKS dapat meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak di daerah pedesaan. Selanjutnya, penelitian oleh Putri & Adiyani (2018) mengkaji strategi dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan di masyarakat suku Akit, dengan penekanan pada pentingnya sosialisasi dan pelayanan langsung. Selain itu, penelitian oleh Syahputra et al. (2018) mengevaluasi proses pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas dan merumuskan strategi peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan tersebut. Terakhir, penelitian oleh Hailuddin et al. (2019) mengidentifikasi sembilan strategi untuk meningkatkan retribusi dari aset tetap tanah di Kabupaten Lombok Barat melalui analisis SWOT. Temuan dari penelitian-penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam konteks penelitian ini.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam konteks administrasi kependudukan dengan mengintegrasikan teori strategi pemerintah Geoff Mulgan dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan kepemilikan KTP Elektronik. Pendekatan ini belum secara luas digunakan dalam penelitian sebelumnya terkait administrasi kependudukan. Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis empiris terbaru dari kondisi lapangan di Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi landasan untuk pengembangan strategi yang lebih efektif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis yang signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi kependudukan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan persentase kepemilikan KTP Elektronik serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

## **II. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi peningkatan persentase kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan dalam kondisi alami tanpa campur tangan peneliti. Mengacu pada teori strategi pemerintah Geoff Mulgan, penelitian ini mencakup lima dimensi: tujuan, lingkungan, pengarah, tindakan, dan pembelajaran. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait. Informan penelitian melibatkan sembilan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, dipilih dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai strategi yang diterapkan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan persentase kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Aceh Besar.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Strategi Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar**



Pemerintah telah melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam beralih dari KTP konvensional ke KTP Elektronik (e-KTP) sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Aceh Besar memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini dengan fokus pada pendaftaran penduduk, perekaman data, dan penerbitan dokumen kependudukan. Beberapa strategi yang diterapkan meliputi sosialisasi dan edukasi melalui kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki e-KTP dan proses pembuatannya. Petugas Registrasi Gampong (PRG) berperan sebagai perpanjangan tangan Dukcapil untuk memberikan informasi dan melakukan pendataan di tingkat gampong.

Dukcapil juga menerapkan strategi mobile service atau pelayanan keliling, dikenal sebagai program "jemput bola," di mana petugas langsung mendatangi lokasi masyarakat untuk melakukan perekaman data. Implementasi layanan terintegrasi dan online juga dilakukan untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi pendaftaran e-KTP. Teknologi ini mempermudah akses informasi bagi masyarakat mengenai persyaratan dan status pendaftaran. Evaluasi dan pemantauan rutin terhadap strategi ini membantu memastikan efektivitas dan memungkinkan penyesuaian jika diperlukan.

### **3.2. Hambatan dan Tantangan dalam Peningkatan Persentase Kepemilikan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar**

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi Dukcapil Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan persentase kepemilikan e-KTP. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki e-KTP dan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran. Faktor-faktor ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program ini. Hambatan teknis seperti pengambilan data biometrik dan pencetakan kartu juga menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan e-KTP.

Infrastruktur yang terbatas, terutama di wilayah terpencil, menambah kesulitan dalam aksesibilitas dan mobilitas petugas untuk melaksanakan program pendaftaran. Tantangan ini mencakup kondisi jalan yang sulit dilalui dan lokasi yang jauh, seperti di Kecamatan Pulo Aceh yang harus dijangkau melalui transportasi laut. Untuk mengatasi hambatan ini, strategi "jemput bola" tetap menjadi solusi penting. Kesadaran masyarakat yang rendah juga perlu diatasi melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif, melibatkan tokoh masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program. Dukcapil Kabupaten Aceh Besar perlu menjalin kemitraan yang efektif dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan mitra strategis, untuk mengatasi kendala ini. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi strategi yang tepat, diharapkan peningkatan kepemilikan e-KTP di Kabupaten Aceh Besar dapat tercapai secara efektif.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini membahas strategi dan hambatan dalam peningkatan persentase kepemilikan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Temuan utama penelitian ini menyoroti efektivitas strategi sosialisasi dan edukasi, penerapan layanan mobile service atau jemput bola, dan pemanfaatan teknologi online. Temuan ini dibandingkan

dengan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan dan hasil yang diperoleh.

Penelitian ini menemukan bahwa kampanye sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dukcapil Aceh Besar berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP Elektronik. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya oleh Yulianto (2019), yang menunjukkan bahwa sosialisasi intensif melalui media massa dan tokoh masyarakat lokal efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa peran Petugas Registrasi Gampong (PRG) sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor krusial yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Strategi jemput bola yang diterapkan oleh Dukcapil Aceh Besar untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau telah terbukti efektif. Penelitian sebelumnya oleh Sari et al. (2020) juga menyoroti pentingnya layanan mobile dalam meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Namun, penelitian ini mengidentifikasi tantangan tambahan yang terkait dengan infrastruktur dan mobilitas petugas, yang memerlukan strategi lebih lanjut untuk mengatasi hambatan geografis dan teknis.

Implementasi sistem E-Siap online oleh Dukcapil Aceh Besar menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pendaftaran KTP Elektronik. Temuan ini mendukung hasil penelitian oleh Handayani (2021), yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan data. Namun, penelitian ini juga menekankan pentingnya keamanan data pribadi dan perlunya sosialisasi tambahan untuk memastikan masyarakat memahami dan memanfaatkan sistem online dengan baik.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam peningkatan kepemilikan KTP Elektronik, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan teknis. Penelitian sebelumnya oleh Nugroho (2018) juga mencatat masalah serupa, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat dan infrastruktur. Namun, penelitian ini memberikan wawasan lebih dalam tentang strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan ini, seperti peningkatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan penggunaan layanan jemput bola yang lebih intensif.

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala signifikan dalam pelaksanaan program peningkatan kepemilikan KTP Elektronik. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Rahmawati (2020), yang menyoroti bahwa dukungan finansial yang memadai sangat penting untuk keberhasilan program administrasi kependudukan. Penelitian ini mengusulkan peningkatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran, sebuah pendekatan yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

#### **3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penelitian ini menemukan bahwa peran Petugas Registrasi Gampong (PRG) sangat efektif dalam sosialisasi dan edukasi terkait KTP Elektronik, terutama di daerah terpencil. Strategi jemput bola atau layanan keliling berhasil meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam program perekaman data biometrik.



Inovasi teknologi seperti sistem E-Siap online mempercepat proses administrasi kependudukan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan transparansi. Namun, perlindungan data pribadi tetap perlu perhatian lebih.

Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kemitraan ini membawa inovasi dan praktik terbaik ke dalam pelayanan publik, menunjukkan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk sukses program.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar telah merancang strategi efektif untuk meningkatkan kepemilikan KTP Elektronik. Strategi ini mencakup sosialisasi dan edukasi, layanan keliling, kolaborasi dengan pihak ketiga, serta penerapan teknologi seperti sistem E-Siap Online. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, tantangan teknis, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Strategi jemput bola dan kerjasama dengan pihak swasta membantu mengatasi beberapa kendala ini, meskipun tantangan tetap ada.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Aceh Besar, sehingga hasilnya mungkin tidak berlaku untuk daerah lain. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga mempengaruhi cakupan penelitian, khususnya dalam pengumpulan data di wilayah terpencil. Metode kualitatif yang digunakan dapat menyebabkan hasil kurang representatif dibandingkan dengan metode kuantitatif.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup wilayah yang lebih luas dan menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) untuk hasil yang lebih komprehensif. Fokus pada evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan dan solusi inovatif untuk hambatan teknis dan infrastrukural. Selain itu, analisis lebih dalam tentang dampak kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat juga penting.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, khususnya para Pejabat beserta Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Dosen, Pelatih, dan Pengasuh yang telah memberikan pendidikan, keterampilan, dan pembinaan selama masa studi. Penulis sangat berterima kasih kepada keluarga penulis yang senantiasa memberi dukungan tanpa henti.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdusamad, D. H. Zu. (2021). Metode penelitian kualitatif. Dalam D. P. Rapanna (Ed.). Sulawesi Selatan: Syakir Media Press.
- Ariska, N. N., & Suharsono, A. (2023). Inovasi proses pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. \*Electronical Journal of Social and Political Sciences (e-Sospol)\*, 4(1), 88–100.

- Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., & Sunarsi, D. (2023). Membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital di Indonesia. *\*Pallangga Praja, 5\*(1)*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/3428/1527>
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *\*Februari, 1\*(1)*, 1–20. <https://www.census.gov/popclock/world>
- Farhani, A., & Adnan, M. F. (2021). Efektivitas pelayanan dokumen kependudukan melalui sistem Paduko. *\*JESS (Journal of Education on Social Science)\*, 5(1)*, 66. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.300>
- Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). Memahami kebijakan administrasi kependudukan. Dalam *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): Vol. Edisi 1 (1st ed.)*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Hailuddin. (2019). Strategi peningkatan penerimaan retribusi aset tetap tanah di Kabupaten Lombok Barat. *\*Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1\*(2)*, 91–105.
- Hardani, & Andriani, H. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Dalam H. Abadi (Ed.), CV. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Idam Fauzan, Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2022). Akuntabilitas program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) di Kota Sukabumi. *\*Jurnal Inovasi Penelitian, 3\*(2)*, 4785–4794.
- Karnia, O., & Fanida, E. H. (2020). Inovasi pelayanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi Dokumen Kependudukan) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. *\*Publika, 8\*(3)*, 1–10.
- Krisnanik, E., Saphira, Q., Intan, D., & Indriana, H. (2021). Desain model MBKM dan kolaborasi kerja sama model Pentahelix guna meningkatkan daya saing lulusan. *\*Konferensi Nasional Ilmu Komputer (KONIK) 2021\**, 1–5.
- Maruapey, M. H. (2019). Urgensi tata kelola inovasi perekaman data dan dokumen kependudukan. *\*Jurnal Governansi, 5\*(1)*, 54–69. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1705>
- Mulgan, G. (2010). The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for. *\*Public Administration Review, 88\*(2)*, 592–595.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Jawa Timur: Media Sahabat Cendikia.
- Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Dalam H. Halim (Ed.), Pusaka Almada.
- Putri, A. R. S., & Adiyani, C. Z. (2018). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *\*Jurnal Dukcapi, 6\*(1)*, 87–104.
- Rohmah, N., & Kholifah, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak di taman kanak-kanak daerah pedesaan. *\*PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 7\*(4)*, 535–541.
- Rombe, A. (2021). Implementasi layanan Go-Dok (Go Dokumen Kependudukan) dalam pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. *\*Jurnal Registratie, 3\*(2)*, 87–101.
- Samsu, S. M. (2017). Metode penelitian: Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)
- Sari, D. R. (2019). Pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hilir (studi pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran). Universitas Islam Riau.



- Setianingrum, K., Sumaryadi, H. N., & Wargadinata, E. L. (2020). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *\*VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia\**, 12(4), 843–854.
- Setyadi, A. (2019). Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan di Kelurahan. Tersedia dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46376>
- Soemanto. (2005). Kebijakan kependudukan di bidang kesehatan: Suatu tinjauan sosiologi hukum. *\*Jurnal Ilmu Hukum\**, 8\*(2), 202–210.
- Sugian, S., Lukman, S., & Wargadinata, E. L. (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (Studi di BKPSDM Kabupaten Sumedang). *\*VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia\**, 13(3), 555–582.
- Sugiyono, P. D. (2020). Metode penelitian kualitatif. Dalam S. Y. Suryandanri (Ed.), Alfabeta.
- Suwito. (2020). Pengantar demografi. Tersedia dari: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, A. K. (2018). Strategi peningkatan pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *\*Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah\**, 10\*(1), 1–14.
- Wargadinata, E. L. (2021). Hubungan dan peran pemangku kepentingan Program Smart-Kampung Kabupaten Banyuwangi. *\*Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja\**, 11(1), 47–64.
- Widowati, N., & Maesaroh. (2022). Analisis kualitas pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. *\*Jurnal Kependudukan\**, 2\*(5), 255.
- Wiladiyah, A. F., & Putri, S. A. (2022). Penerapan inovasi Aduh Bra (Administrasi Huruf Braille) dalam upaya peningkatan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang tunanetra tahun 2022 di Dispendukcapil Kota Malang. *\*Journal of Governance Innovation\**, 4\*(2), 130–140. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1694>